
Reklamasi Dan Pascatambang

MEMBANGUN BERSAMA RUMAH AGRARIA

Undang-Undang Minerba (Mineral dan Batu Bara)

Dasar-Dasar Hukum Lingkungan dan Kearifan Lokal Masyarakat

International Business, Trade and Institutional Sustainability

Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia

Manajemen Proyek Konstruksi

Buku Ajar Hukum Pertambangan

Proceedings of the International Conference on Advance Research in Social and Economic Science (ICARSE 2022)

Politik Kebijakan Publik di Sektor Pertambangan

REKLAMASI LAHAN PASCA TAMBANG Pemberian Pupuk Dalam Budidaya Gaharu

Menelidik Dampak Eksploitasi Tambang Batu Bara Jilid II

Buku Ringkasan terhadap LHP atas LKPD Provinsi di Wilayah Sumatera: Berdasarkan IHPS I Tahun 2019

Batubara Indonesia

DINAMIKA HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK PERTAMBANGAN DALAM KONTEKS LINGKUNGAN BERKELANJUTAN

SUPER COMPLETE IPS SMA/MA KELAS 10-11-12

Konservasi Mangrove dan Kesejahteraan Masyarakat

Fungsikan Surveyor Indonesia - Jangan Biarkan Asing Kuras

FUNGI MIKORIZA ARBUSKULA MEMPERCEPAT REHABILITASI LAHAN TAMBANG

Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Dan Batu Bara

Manajemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan

TABIR KEADILAN

Hukum Administrasi Negara

Buku Ringkasan terhadap LHP atas LKPD Provinsi di Wilayah Kalimantan Berdasarkan IHPS I Tahun 2019

PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN

Industri Pertambangan Di Indonesia

Era Baru Hukum Pertambangan

Mutu Manikam
Akuntansi Pajak Pertambangan
Pengantar Teknologi Mineral
Politik Tanpa Korupsi
Hukum Mineral dan Batubara: Instrumen Ekonomi Lingkungan pada Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara Berkelanjutan
Mengungkap Dugaan Error in Persona & Error in Objecto dalam Putusan Perkara Penambangan Tanpa Izin
Penerapan Prinsip Hukum Lingkungan dalam Realitas Kehidupan Masyarakat
Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara
Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batubara
Tinjauan OECD Terhadap Kebijakan Pertumbuhan Hijau Indonesia 2019
Tata Kelola Wisata Bekas Lahan Tambang
FLORA - WILAYAH KONSESI PT. VALE INDONESIA SOROWAKO - LUWU TIMUR SULAWESI SELATAN, INDONESIA
Mining in the Asia-Pacific
Good Mining Practice di Indonesia

Reklamasi Dan Pascatambang

Downloaded from hl.uconnect.hl.u.edu.vn
by guest

MCKEE ALVARADO

MEMBANGUN BERSAMA RUMAH AGRARIA Penerbit Andi
Buku yang terdiri dari tiga belas bab ini ditulis guna keperluan dunia kampus maupun umum, baik itu Fakultas Hukum maupun fakultas-fakultas lain dan masyarakat umum yang memerlukan informasi pengetahuan mengenai Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Penjelasan terkini dilakukan dengan menggunakan berbagai peraturan terbaru dan analisa hukum juga dijabarkan secara rinci dalam buku ini.
Undang-Undang Minerba (Mineral dan Batu Bara) MediaPressindo
"Isi buku ini menjelaskan tentang kegiatan tambang yang belum

diawasi dengan ketat termasuk penerimaan pajak dan royalti pemerintah sehingga membutuhkan independent Surveyor untuk pengawasan lapangan. Pemerintah sangat berpotensi menaikkan pendapatan Pajak dan Royalti pertambangan yang diawasi oleh Badan Independent. Dalam hal ini Badan Independent dapat menghitung kuantitas mineral yang diangkut, sekaligus mengetahui kualitas atau jenis mineral tambang apa saja yang diangkut penambang yang dilakukan melalui analisa Laboratorium. Kekuatan buku ini yaitu : mencoba memasukkan komponen / Badan Independent Surveyor dalam perhitungan Pajak dan Royalty pertambangan di Indonesia. Agar perhitungan terhadap Kuantitas maupun kualitas jenis mineral yang diangkut diketahui dengan persis jumlahnya. Hal ini dapat dibantu oleh kehadiran Independent Surveyor sehingga kerugian negara dapat

diminimalkan dari aktivitas pertambangan. Tranfer Pricing terhadap ekspor mineral Tambang Indonesia dan keberadaan Surveyor ; Manipulasi harga mineral yang diangkut dari Indonesia sehingga terjadi minimalisasi Pajak dan dan Royalty Self Assessment dan Peranan Surveyor Terhadap Penerimaan Pajak Pertambangan : Sistem self assessment yang berpeluang merugikan Negara dalam penerimaan pajak."

Dasar-Dasar Hukum Lingkungan dan Kearifan Lokal Masyarakat
Springer Nature

Judul : Pengantar Teknologi Mineral Penulis : Fachruzzaki, S.Si., M.T. Marlina K, S.T., M.T. Rina Lestari, S.Si., M.T. Rexanda Saveta, S.T., M.Sc Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 112 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-623-162-813-8 No. E-ISBN : 978-623-162-814-5 (PDF) SINOPSIS Pengantar Teknologi Mineral adalah panduan komprehensif yang menggali seluk-beluk dunia teknologi mineral dengan jelas dan mendalam. Buku ini dirancang khusus untuk membantu pembaca memahami konsep-konsep pertambangan, alur proses, dan pemanfaatan mineral. Selain itu, dipaparkan aspek teknis mengenai operasi penambangan, peralatan tambang dan peledakan dengan meninjau dampak lingkungan dan upaya pemulihan, termasuk reklamasi dan pascatambang. Semua ini dirancang dengan baik agar bisa memenuhi kaidah pertambangan yang baik (Good Mining Practice). Penulis membimbing pembaca melalui perjalanan mendalam dari eksplorasi mineral hingga pengolahan dan pemanfaatannya. Dengan gaya penulisan yang mudah dipahami dan ilustrasi yang mendukung, buku ini cocok sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa, profesional, dan siapa pun yang ingin mendapatkan wawasan mendalam tentang dunia mineral.

International Business, Trade and Institutional Sustainability
Gramedia Pustaka Utama

Ekosistem hutan mangrove (EHM) memiliki keterkaitan fungsi yang sangat signifikan bukan hanya bagi masyarakat pesisir, melainkan juga bagi masyarakat non-pesisir. EHM memiliki berbagai fungsi yang sangat bermanfaat, misalnya, sebagai habitat berbagai biota laut yang bersifat ekonomis dan ikut berperan sebagai wahana proteksi masyarakat pesisir dan non-pesisir dari terpaan badai. Bahkan, masih banyak manfaat dari EHM yang belum diketahui masyarakat, umpamanya, buah mangrove, dapat dijadikan makanan, obat, dan sirup. Melihat begitu multifungsinya EHM bagi masyarakat banyak, sudah seharusnya kita bahu-membahu berperan serta menjaga EHM. Sayangnya, perhatian pemerintah pada ekosistem hutan mangrove tidak sebesar perhatian pemerintah pada kawasan hutan secara umum. Indonesia memiliki ekosistem hutan mangrove seluas 3.6 juta hektar dengan kondisi masih baik. Sementara itu, luas ekosistem hutan mangrove (EHM) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai 2013 mencapai 117.229,29 hektar. Kondisi kekinian mangrove di Kabupaten Belitung masih relatif terjaga, sementara kondisi mangrove di Kabupaten Bangka rusak parah, akibat kegiatan penambangan timah legal dan ilegal. Buku yang berjudul Konservasi Mangrove dan Kesejahteraan Masyarakat ini merupakan hasil penelitian pada 2012, 2013, dan 2014 di Kabupaten Belitung dan Bangka Barat. Berisi sembilan tulisan yang dibahas oleh para ahli yang memiliki integritas tinggi dengan latar belakang keilmuan dari berbagai perguruan tinggi ternama dalam dan luar negeri. Buku ini memberikan proses pembelajaran yang sangat bermanfaat untuk

menambah khazanah pengetahuan dan keilmuan dalam mengonservasi suatu ekosistem mangrove dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal yang telah menjadi aset masyarakat secara turun-temurun. Semoga Buku ini bermanfaat bagi para pembaca.

Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Uwais Inspirasi Indonesia

Dalam memenuhi amanat UUD 1945 Pasal 23E ayat (3), DPR RI sebagai salah satu lembaga perwakilan wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI dalam rangka untuk mendorong perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Termasuk didalamnya pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang dilaksanakan Pemerintah Daerah. Untuk mendukung tugas dan fungsi DPR RI tersebut serta memperkuat referensi dan memudahkan pemahaman terhadap IHPS I Tahun 2019, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian Sekretaris Jenderal DPR RI telah membuat ringkasan terhadap LHP atas 34 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi. Ringkasan terhadap LHP atas 34 LKPD Provinsi. Ringkasan ini disusun sebagai bentuk dukungan atas kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI dalam fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah selama periode satu tahun anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Manajemen Proyek Konstruksi UGM PRESS

Buku berjudul 'Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan: Jejak Pemikiran, Pendekatan, dan Isu Kontemporer' ini merupakan refleksi dari perkembangan ranah pembangunan sosial dan

kesejahteraan. Buku ini terdiri dari berbagai artikel yang ditulis oleh para dosen dan peneliti di Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. Terdapat beragam bahasan di dalamnya mulai dari metodologi, teori-teori, hingga berbagai tema di ranah pembangunan sosial dan kesejahteraan yang ternyata berkembang dari masa ke masa seturut perubahan masyarakat. Berbagai sudut pandang yang tersaji di dalam buku ini juga mencerminkan variasi pendekatan solutif yang sekiranya sanggup merespons berbagai persoalan yang hadir di dalam masyarakat. Akhirnya, buku ini ditujukan bagi mahasiswa, dosen, peneliti dan siapa saja yang berminat dan peduli pada isu-isu pembangunan sosial dan kesejahteraan. Buku ini diharapkan mampu menjadi inspirasi bagi mereka yang berminat untuk mengembangkan ranah keilmuan pembangunan sosial dan kesejahteraan.

Buku Ajar Hukum Pertambangan Springer

Industri pertambangan di Indonesia menjadi salah satu penyumbang devisa negara yang besar. Salah satu hasil tambang yang mempunyai potensi besar adalah batu bara. Indonesia berada pada urutan kedua dalam sepuluh besar negara pengekspor batubara di dunia, di mana menurut data Badan Pusat Statistik, Indonesia mengekspor batubara, sebanyak 366.970 juta ton pada tahun 2015. Dengan kondisi tersebut, maka wajar apabila kemudian banyak pengusaha lokal maupun dari luar negeri yang tergiur masuk ke bisnis tambang batubara di Indonesia. Selain batubara, dalam buku ini juga diulas tuntas komoditas pertambangan lainnya, yaitu emas, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Jadikan buku ini sebagai referensi Anda dalam

mempelajari industri pertambangan di Indonesia. Buku persembahan penerbit ByPass Proceedings of the International Conference on Advance Research in Social and Economic Science (ICARSE 2022) AMERTA MEDIA

This book provides the most comprehensive survey of mining activity and the principal challenges confronting the resources industry in the Asia-Pacific region today, and presents new theoretical and practical insights into the political and business risks faced by mining companies operating in the region from both academic and corporate perspectives. It focuses on the exploration, production and trade of the principal commodities coal, iron ore, uranium, oil and gas, and gold, as well as the emerging commodities unconventional gas and rare earth minerals, provides the reader with a valuable understanding of resource activity in the region. In addition, it also integrates and draws attention to eight key issue areas which have the potential to pose significant risks, challenges and opportunities for the industry going forward, which include sustainable development, resource governance and economic contributions, declining ore grades and territorial expansion, community aspects of mining, mining and indigenous peoples, climate change, and impact assessment. The contributors to this volume are experts in their respective fields, and the diversity of voices makes this book a must read for scholars, industry participants, investors and policy-makers with an interest in mining in the Asia-Pacific. *Politik Kebijakan Publik di Sektor Pertambangan* Baitul Hikmah Buku "Politik Tanpa Korupsi" ini, terdiri atas lima bagian yang saling terhubung satu sama lain. Pertama, memahami korupsi.

Bagian ini berisi kumpulan tulisan tentang pengetahuan dasar tentang apa itu korupsi, bagaimana jejak sejarahnya di republik ini, bagaimana korupsi itu bekerja, dan bagaimana kita melawannya. Kedua, korupsi sumber daya alam. Bagian ini berisi kumpulan tulisan tentang bagaimana korupsi bekerja di sektor sumber daya alam. Mengupas mengenai titik rawan korupsi di sektor sumber daya alam, fenomena korupsi sumber daya alam yang kerap ditemui, dan pengalaman empirik bagaimana korupsi berdampak besar kepada kerusakan lingkungan dan pengancuran ruang hidup Rakyat. Ketiga, membela KPK. Bagian ini berisi kumpulan tulisan tentang sikap dan uraian tanggung jawab terhadap situasi yang dialami oleh KPK, terutama satu dekade belakangan ini. Serangan terhadap KPK yang datang bertubi-tubi, membutuhkan sokongan dan solidaritas secara luas. Sekalipun pada akhirnya KPK dilumpuhkan dari luar dan digerogoti dari dalam, namun tulisan-tulisan ini memberikan penesan jika kita pernah berada pada barisan yang sama. Keempat, politik tanpa korupsi. Ini merupakan jantung dari keseluruhan tulisan dalam buku ini. Bagian ini berisi kumpulan tulisan yang menelanjangi praktek politik yang busuk dan menjijikkan di republik ini. Korupsi telah mengotori politik. Korupsi pula yang membuat tidak sedikit orang yang merasa jijik dengan politik. Kelima, korupsi dan pemilihan umum. Sebagai sarana yang seharusnya menyaring orang-orang terbaik, politik elektoral sebagai hulu proses pengisian jabatan-jabatan publik, mesti dikawal dengan baik. Orang-orang yang hendak bertarung dalam politik elektoral ini, harus dipastikan memiliki rekam jejak yang bersih, program yang pro-rakyat, serta rela bekerja demi kepentingan orang banyak. Kelima bagian dalam buku ini,

hendak mengirim pesan bahwa politik sesungguhnya hal yang tidak bisa kita hindari. Politik jika dihindari, malah akan melindas kita. Jalan terbaik adalah dengan memimpin dan mengendalikannya. Intinya, politik memang penting. Tapi kita membutuhkan politik yang bermartabat, yakni “Politik Tanpa Korupsi”.

REKLAMASI LAHAN PASCA TAMBANG Pemberian Pupuk Dalam Budidaya Gaharu TOHAR MEDIA

Akuntansi Pajak Pertambangan memberikan gambaran perihal dasar-dasar Akuntansi dan perpajakan dan untuk Pertambangan. Akuntansi Pajak Pertambangan tidak hanya memberikan undang-undang dan sistem dan Penyusunannya, namun lebih memberikan gambaran pencatatan dan pelaporan berdasarkan PSAK. Sistematika buku ini dimulai dari Dasar Hukum Pertambangan Minerba, Pengajuan Ijin Pertambangan Minerba, Tahap Penambangan Batubara, Akuntansi Perusahaan Tambang, Tata Kelola Mineral, Aspek Pajak Tambang Batubara, Kontrak Karya Pertambangan (KKP). Pembahasan berikutnya Aspek Hukum Perpanjangan KK PKP2B, Domestic Market Obligation (DMO) Batubara, PPH Pasal 15, PPH Pasal 23, ISAK 29, PSAK 33, PSAK 64, Persiapan Pemeriksaan Pajak Tambang Batubara. Gagasan utama dari buku ini adalah memberikan panduan kepada pengusaha, praktisi dan karyawan agar bisa manage usaha Pertambangan. Namun demikian buku ini senantiasa memperhatikan ketentuan perpajakan & PSAK yang terbaru. Buku yang berjudul Akuntansi Pajak Pertambangan memberikan gambaran sistem, dan pencatatan dan bentuk laporan keuangan di Pertambangan. Bagi para wajib pajak, praktisi, akademisi dan perusahaan silahkan dibeli dan dibaca buku ini karena ini paket

lengkap perihal Akuntansi dan Perpajakan Pertambangan (Mining)

Menelisis Dampak Eksploitasi Tambang Batu Bara Jilid II Faqih Publishing

Bagaimanakah prinsip hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara? Bagaimana pulakah pengaturan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait sumber daya mineral dan batu bara? Adakah konflik dan pengaturan yang tumpang-tindih antar kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara? Jika ada, bagaimanakah penyelesaiannya ke depan? Buku ini menyajikan jawaban atas pertanyaan tersebut dan sejumlah pertanyaan lainnya terkait pengaturan kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara. Pembahasan buku ini dibuka dengan pembahasan tentang kerangka dan teoretik pengaturan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara. Setelah itu, dibahas mengenai prinsip-prinsip dasar pengaturan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara. Lalu dilanjutkan dengan pembahasan pasang surut pengaturan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara. Kemudian dibicarakan terkait bagaimana pengaturan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara ke depan. Sebagai bahan bacaan, buku ini tidak hanya dapat dibaca oleh para mahasiswa-mahasiswa dan para pengajar dari

Fakultas Hukum. Tetapi, buku ini juga dapat dibaca oleh para pembuat kebijakan dan para pengamat di bidang pertambangan atau mereka yang menaruh minat pada isu-isu sumber daya mineral dan batu baru.

Buku Ringkasan terhadap LHP atas LKPD Provinsi di Wilayah Sumatera: Berdasarkan IHPS I Tahun 2019 Bypass

Buku ini merupakan kolaborasi dari berbagai penulis di bidang Hukum Administrasi Negara dari berbagai perguruan tinggi ternama di Indonesia. Dalam Ilmu Hukum, salah satu cabang ilmu yaitu Hukum Administrasi Negara memiliki peran yang sangat strategis dalam dinamika perkembangan hukum yang ada di negara kita tercinta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seiring dengan dinamisasi yang ada dalam kehidupan demokrasi yang ada. Buku ini dapat di gunakan sebagai acuan dalam perkuliahan Hukum Administrasi Negara sebagai salah satu mata kuliah wajib yang harus di tempuh oleh setiap mahasiswa Fakultas Hukum. Buku ini juga dapat digunakan oleh pengajar atau pengampu mata kuliah Hukum Administrasi Negara dalam menyusun materi perkuliahan selama satu semester. Tidak hanya untuk kalangan akademisi dan mahasiswa, buku Hukum Administrasi Negara ini juga bisa di jadikan literatur oleh masyarakat umum dalam memahami dan mendalami keilmuan hukum khususnya Hukum Administrasi Negara. Buku ini terdiri dari 20 Bab yang terdiri dari Bab 1 Pengantar Hukum Administrasi Negara, Bab 2 Hukum Administrasi Negara dalam Kerangka Hukum Nasional, Bab 3 Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Ilmu Hukum yang Lainnya, Bab 4 Asas Asas Hukum Administrasi Negara, Bab 5 Sumber Hukum Administrasi Negara, Bab 6 Kewenangan, Bab 7 Sistem Hukum Administrasi

Negara, Bab 8 Organisasi dan Tata Kelola Pemerintahan, Bab 9 Perbuatan Administrasi Negara, Bab 10 Keputusan Administrasi dan Proses Pembuatan Keputusan, Bab 11 Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Keputusan Administrasi, Bab 12 Pengawasan Administrasi Negara, Bab 13 Sanksi Administrasi Negara, Bab 14 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara, Bab 15 Proses Peradilan Administrasi Negara, Bab 16 Alternatif Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara, Bab 17 Aspek Hukum Pengujian, Bab 18 Good Governance, Bab 19 Hukum Administrasi Lingkungan dalam Pengelolaan Pertambangan, dan Bab 20 Tantangan dan Isu Kontemporer Hukum Administrasi Negara.

Batubara Indonesia Yayasan Pustaka Obor Indonesia

This book addresses the gap between innovative technologies and their adoption. It showcases research, feasibility studies and projects that demonstrate a variety of ways to implement environmental sustainability in globally operating firms, as well as best practices in areas such as international management, adoption of cleaner technologies, global supply chains, greenhouse gas emission reduction, and transportation. The book provides state-of-the-art information on issues including: Global sustainable management practices Global sustainable food and agricultural markets Global responsible mining and energy Global sustainable sourcing Global sustainable transportation Global conservation innovations and investments Presenting expert contributions from industry, government and academia, discussing a variety of themes and perspectives on the topic "international business as a positive force of environmental sustainability" it is a vital resource for stakeholders in the

international business community.

DINAMIKA HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK PERTAMBANGAN DALAM KONTEKS LINGKUNGAN BERKELANJUTAN Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta

Era baru hukum pertambangan dimulai sejak era reformasi pemerintahan daerah, di mana terjadi perubahan drastis terhadap kewenangan pengolahan pertambangan. Semula berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang “Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan”, paradigma pengelolaan pertambangan bersifat sentralistis, di mana kewenangan pengelolaan bahan galian golongan a dan b berada di tangan Menteri (Pemerintah Pusat). Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang “Pemerintah Daerah” di era reformasi, kewenangan pengelolaan pertambangan diserahkan kepada kabupaten/kota dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Sementara menunggu amandemen terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001. Dalam peruses penyesuaian tersebut ternyata baru pada akhir 2014 disetujui dan diterbitkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang “Pertambangan Mineral dan Batubara”. Berarti hampir 10 (sepuluh) tahun pengelolaan pertambangan tidak memiliki undang-undang yang menjadi pedomannya. Hal ini membawa potret kelam pengelolaan pertambangan di Indonesia, yang berakibat tidak terkendalinya penerbitan-penerbitan izin tambang di Indonesia. Baru sekita 4 (empat) tahun berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, kemudian terbit Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang “Pemerintahan Daerah”, yang kembali membawa perubahan drastis dalam kewenangan pengelolaan

pertambangan. Dimulailah kembali usaha melakukan amandemen dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009. Dalam buku ini dibahas secara komprehensif perjalanan panjang perubahan pengelolaan pertambangan di Indonesia hingga saat ini. Buku ini sangat cocok bagi para akademisi maupun praktisi termasuk lawyer, para mahasiswa. Pemerhati hukum pertambangan, pejabat pemerintah, para pelaku usaha dan para pengambil kebijakan.

SUPER COMPLETE IPS SMA/MA KELAS 10-11-12 Elex Media Komputindo

BUKU RAHASIA SISWA JENIUS UNTUK PERSIAPAN ULANGAN HARIAN, PTS, PAS, PAT, UJIAN NASIONAL, SBMPTN, SNMPTN, & TES PTN FAVORIT Buku ini berisi kumpulan inti materi pelajaran IPS, seperti Ekonomi, Sosiologi, Geografi dan Sejarah. Disusun sesimpel mungkin agar lebih mudah dibaca dan dipahami. Sangat pas sebagai pegangan serta pendamping belajar dimanapun dan kapanpun dibutuhkan. KONSEP UP TO DATE Susunan inti materi diambil dari Pemendikbud No.24 Tahun 2016 Tentang Pencapaian Standar Kompetensi Ilmu Pengetahuan Sosial TEKNIK PENYAMPAIAN MATERI BERJENJANG Disusun dari jenjang 10 sampai 12 bertujuan untuk memudahkan mencari materi berdasarkan jenjang kelas yang berbeda SANGAT COCOK UNTUK SISWA YANG AKAN MENGHADAPI UJIAN Solusi tepat untuk siswa yang belum sempat membaca setumpukan buku dalam mempersiapkan ujian disekolah atau persiapan masuk PTN (seperti SIMAK, UI, UM, UGM, dan lainnya) #SahabatPenaCerdas *Konservasi Mangrove dan Kesejahteraan Masyarakat* Airlangga University Press

Secara garis besar kajian buku ini menyorot pada perubahan

konstruksi hukum di bidang perizinan pertambangan era Hindia Belanda dengan pra-konsesi dan konsesi, kemudian era awal kemerdekaan hingga Orde Lama/ Orde Baru melalui Kuasa Pertambangan dan Kontrak Karya, kemudian Izin baik berupa Konsep Pengertian dan Ruang Lingkup Izin, Pembagian Izin berdasarkan Undang-undang Minerba (UU 4/2009 dan UU 3/2020), serta UU Cipta Kerja dalam UU 11/2020, Perppu 2/2022 dan UU 6/2023). Problematik Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, serta Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Fungsikan Surveyor Indonesia - Jangan Biarkan Asing Kuras PT.

RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers

Dalam upaya konservasi biodiversitas, PT Vale telah memiliki rencana pascatambang dan manajemen keanekaragaman hayati untuk 100% wilayah operasi penambangan di blok Sorowako yang merujuk pada Peraturan Menteri ESDM No 7 Tahun 2014 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Untuk mendukung manajemen keanekaragaman hayati yang terdapat pada wilayah konsesi PT. Vale maka informasi keberagaman flora sangat dibutuhkan untuk perencanaan kedepannya

FUNGI MIKORIZA ARBUSKULA MEMPERCEPAT REHABILITASI

LAHAN TAMBANG Sada Kurnia Pustaka

Tambang terbuka dalam pengelolaannya mengakibatkan limbah dari kegiatan pertambangan batubara, serta memberi perubahan pada struktur tanah, kestabilan lereng, erosi, air limpasan, dan permukaan air tanah. Adanya reklamasi bertujuan untuk mengelola kualitas lingkungan akibat dari kegiatan penambangan. Pemberian pupuk dapat memperbaiki kondisi sifat fisik, kimia dan biologi tanah yang telah rusak, disisi lain gaharu

menjadi pohon unggulan untuk penanaman lahan bekas tambang. Buku ini membahas terkait pengaruh pemberian pupuk terhadap pertumbuhan gaharu di lahan pasca tambang.

Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Dan Batu Bara OECD Publishing

Manusia dan lingkungan mempunyai hubungan timbal balik.

Lingkungan tidak bisa tertata rapi kalau tidak dirawat oleh manusia. Demikian sebaliknya kehidupan manusia tidak bisa berjalan dengan baik kalau lingkungan hidup mengalami kerusakan.

Agar hubungan yang harmoni manusia dengan lingkungan terjalin, diperlukan aturan. Aturan seperti apa yang diperlukan agar relasi baik itu terjadi? Elemen-elemen apa saja yang menjadi objek aturan itu? Inilah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam buku Dasar-dasar Hukum Lingkungan dan Kearifan lokal ini. Buku ini ditulis oleh ahli dalam bidangnya.

Karena itu pula pembahasan yang disajikan sangat mendasar dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Dalam buku ini dibicarakan secara mendalam persoalan-persoalan mendasar di sekitar lingkungan hidup dan bagaimana keterkaitannya dengan kearifan lokal itu di tengah pembangunan yang begitu pesat. Sasaran penulisan buku ini memang mahasiswa Fakultas Hukum. Akan tetapi melihat isinya, para peminat lingkungan, pemerhati masalah budaya, dan yang peduli pada keberlanjutan pembangunan bangsa sangat tepat membaca buku ini.

Manajemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan Lembaga Studi Hukum Indonesia

Buku "Politik Kebijakan Publik di Sektor Pertambangan"

membahas peran politik dan kebijakan publik dalam mengatur

sektor pertambangan, yang merupakan sektor yang penting untuk ekonomi banyak negara. Buku ini membahas berbagai isu dan tantangan yang dihadapi dalam mengatur sektor pertambangan, seperti konflik antara kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan, pengaturan investasi asing, pemberdayaan masyarakat lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penulis buku ini membahas berbagai aspek kebijakan publik dalam sektor pertambangan, seperti regulasi,

pemberdayaan masyarakat, pengawasan dan penegakan hukum, dan hubungan antara pemerintah, perusahaan tambang, dan masyarakat. Secara keseluruhan, buku ini memberikan wawasan dan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana politik dan kebijakan publik memainkan peran penting dalam mengatur sektor pertambangan, serta memberikan kontribusi penting untuk diskusi tentang pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.